

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Banjarbaru

a. Letak Geografis Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, Kota Banjarbaru memiliki posisi yang cukup strategis karena berada di tengah wilayah provinsi dan menjadi salah satu pusat kegiatan pemerintahan serta perekonomian daerah. Kota Banjarbaru juga dikenal sebagai salah satu kota yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Secara geografis, Kota Banjarbaru terletak pada koordinat sekitar $3^{\circ}27' - 3^{\circ}29'$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}45' - 114^{\circ}48'$ Bujur Timur. Wilayah Kota Banjarbaru berbatasan dengan beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjar

Luas wilayah Kota Banjarbaru sekitar $371,38 \text{ km}^2$ yang terbagi menjadi beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin, Liang Anggang, dan Cempaka. Kondisi geografis

Kota Banjarbaru didominasi oleh wilayah dataran rendah dengan tingkat perkembangan wilayah yang cukup pesat. Selain itu, Kota Banjarbaru juga memiliki akses transportasi yang cukup baik karena terdapat Bandara Internasional Syamsudin Noor yang menjadi pintu gerbang utama transportasi udara di Kalimantan Selatan (Banjarbaru, 2023, hlm. 1-3).

Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Kota Banjarbaru sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kondisi ini juga mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor usaha kecil di daerah tersebut.

b. Perkembangan Ekonomi Banjarbaru

Perkembangan ekonomi Kota Banjarbaru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta berkembangnya berbagai sektor usaha di daerah tersebut. Pemerintah daerah juga terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi suatu daerah adalah melalui peningkatan jumlah pelaku usaha serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Di Kota Banjarbaru, sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian daerah. Banyak

masyarakat yang menjalankan usaha di bidang kuliner, perdagangan, jasa, serta industri rumah tangga.

Selain itu, keberadaan fasilitas infrastruktur yang cukup memadai juga menjadi faktor pendukung perkembangan ekonomi di Kota Banjarbaru. Infrastruktur seperti jalan, pusat perdagangan, pasar, serta fasilitas transportasi memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dengan adanya fasilitas tersebut, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih efektif dan efisien.

Perkembangan ekonomi yang cukup pesat di Kota Banjarbaru juga didukung oleh meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan usaha masyarakat, terutama dalam hal penyediaan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Statistik, 2023, hlm. 96). Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh lembaga perbankan, termasuk Bank Syariah Indonesia.

c. Peran UMKM dalam Perekonomian Banjarbaru

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, termasuk di Kota Banjarbaru.

Menurut Tambunan Tulus (2012, Hlm. 15), UMKM tidak hanya berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga

berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagian besar masyarakat di Kota Banjarbaru menjalankan usaha berskala kecil dan menengah yang bergerak di berbagai bidang seperti perdagangan, kuliner, jasa, serta industri rumah tangga. Keberadaan UMKM tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Namun demikian, pelaku UMKM sering menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usahanya, terutama dalam hal keterbatasan modal usaha. Menurut Beck & Demircuc-Kunt (2006, Hlm. 2932), Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan sering menjadi salah satu hambatan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, dukungan dari lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk membantu pelaku UMKM dalam memperoleh tambahan modal usaha

Salah satu program yang bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif yang memiliki keterbatasan modal.

Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan KUR juga disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan KUR Syariah diharapkan dapat membantu pelaku

UMKM dalam mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan akses mereka terhadap layanan keuangan formal.

Dengan adanya akses pembiayaan yang lebih mudah, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya memperoleh tambahan modal usaha tetapi juga dapat meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan kondisi di mana masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, pembiayaan KUR Syariah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM serta meningkatkan inklusi keuangan di Kota Banjarbaru.

2. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

a. Sejarah singkat Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank Syariah terbesar di Indonesia yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Bank ini resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik pemerintah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Penggabungan ketiga bank tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional agar mampu bersaing di tingkat global. Dengan adanya merger tersebut, Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat menjadi bank syariah yang lebih kuat, memiliki jaringan yang luas, serta mampu memberikan layanan keuangan syariah yang lebih optimal kepada masyarakat.

Menurut Ascarya (2015, Hlm. 23), Bank Syariah Indonesia beroperasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, serta keberkahan dalam setiap kegiatan usaha. Dalam menjalankan operasionalnya, bank ini menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik untuk individu maupun pelaku usaha

Sejak berdirinya, Bank Syariah Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah nasabah, bertambahnya jaringan kantor layanan, serta meningkatnya penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Bank ini juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai lembaga keuangan syariah, bank syariah indonesia tidak hanya berfokus pada kegiatan perbankan semata, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembiayaan yang mendukung sektor usaha produktif (Antonio, 2001, hlm. 19).

3. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang menerima pembiayaan KUR Syariah dari Bank Syariah Indonesia di Banjarbaru. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 96 orang yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Karakteristik responden dalam penelitian ini dilihat dari beberapa aspek yaitu Jenis usaha, Skala usaha, Lama usaha, Lama menerima pembiayaan, dan jenis akad pembiayaan. Pengelompokan karakteristik responden ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai profil pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini.

a. Jenis Usaha Responden

Berdasarkan Hasil Kuesioner yang telah disebarkan, responden memiliki berbagai jenis usaha seperti perdagangan (jual beli barang), jasa (salon, bengkel, laundry, dll), kuliner (Makanan/minuman), industri rumah tangga (produksi rumahan), dan lainnya.

Tabel 4. 1
Jenis Usaha Responden

Jenis Usaha	Jumlah	persentase
perdagangan	40	41,7%
jasa	11	11,5%
kuliner	24	25%
Industri rumah tangga	3	3,1%
lainnya	18	18,8%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam survei ini terlibat dalam sektor perdagangan. Khususnya di antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berpartisipasi dalam

survei ini, skenario ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan sangat berpengaruh dalam aktivitas ekonomi publik.

b. Skala Usaha

Tabel 4.2
Skala Usaha Responden

Skala usaha	Jumlah	Persentase
Usaha mikro	31	32,3%
Usaha kecil	43	44,8%
Usaha menengah	22	22,9%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Usaha kecil merupakan sebagian besar responden studi ini, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Usaha mikro dan menengah mengikuti di belakangnya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil di Indonesia banyak memanfaatkan program pembiayaan kredit usaha kecil (KUR) yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia.

c. Lama Usaha

Tabel 4.3
Lama Usaha Responden

Lama Usaha	Jumlah	Persentase
< 1 tahun	36	37,5%
1-3 tahun	31	32,3%
> 3 tahun	29	30,2%

Total	96	100%
-------	----	------

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Respons dalam survei ini mencakup berbagai usia perusahaan, mulai dari usaha yang baru berdiri hingga usaha yang telah berjalan lebih dari tiga tahun. Jelas dari situasi ini bahwa baik bisnis baru maupun bisnis yang sudah ada di Banjarbaru memanfaatkan pembiayaan kredit usaha kecil (KUR) yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia.

d. Lama Pembiayaan KUR Syariah

Tabel 4.4
Lama Pembiayaan Responden

Lama Pembiayaan	Jumlah	Persentase
6-12 bulan	60	62,5%
> 1 tahun	36	37,5%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah memanfaatkan pembiayaan KUR Syariah dari Bank Syariah Indonesia, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, dengan jangka waktu pembiayaan yang berbeda. Lamanya waktu suatu perusahaan memiliki akses ke layanan keuangan formal dan seberapa jauh bisnis mereka berkembang dipengaruhi oleh pembiayaan yang mereka terima.

e. Jenis akad

Tabel 4.5
Jenis Akad Responden

Jenis Akad	Jumlah	Persentase
Murabahah	36	37,5%
Mudharabah	23	24%
Musyarakah	12	12,5%
Tidak mengetahui	25	26%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Karena metode pembiayaan yang sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku bisnis, kontrak murabahah merupakan kontrak yang paling umum digunakan dalam KUR Syariah, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas.

Responden dalam penelitian ini berasal dari berbagai latar belakang bisnis, seperti yang ditunjukkan oleh karakteristik yang dijelaskan di atas. Keragaman ini terlihat dari jenis usaha yang mereka jalankan, skala usaha, lama usaha, durasi pembiayaan, dan jenis akad yang mereka miliki. Situasi ini menunjukkan bahwa banyak UMKM di Kota Banjarbaru telah menggunakan pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia untuk mengembangkan usaha mereka.

4. Inklusi Keuangan

Tabel 4.6
Menggunakan Mobile Banking / Internet Banking

Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
Tidak	11	11,5%
Ya	85	88,5%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Mayoritas responden menggunakan mobile banking atau internet banking, sedangkan sebagian kecil lainnya tidak menggunakan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan layanan perbankan digital cukup tinggi, yang mencerminkan meningkatnya inklusi keuangan di kalangan UMKM.

Tabel 4.7
Menggunakan QRIS Atau Alat Pembayaran Non-Tunai

Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
Tidak	12	12,5%
Ya	84	87,5%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Mayoritas responden telah menggunakan QRIS atau alat pembayaran non-tunai, sementara sebagian kecil lainnya belum menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi pembayaran digital di kalangan UMKM

tergolong tinggi, yang mencerminkan peningkatan inklusi keuangan khususnya dalam penggunaan transaksi non-tunai.

5. Informasi Responden Variabel X (Variabel Independen) dan Variabel Y (Variabel Dependen)

a. Variabel X (Variabel Independen)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia. Variabel dependen adalah Inklusi Keuangan.

Tabel 4.8
Jumlah pembiayaan KUR Syariah yang saya terima dari Bank Syariah Indonesia sesuai dengan kebutuhan usaha

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Sangat Tidak setuju	2	2,1%
2.	Tidak Setuju	3	3,1%
3.	Netral	18	18,8%
4.	Setuju	51	53,1%
5.	Sangat Setuju	22	22,9%
Total		96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa jumlah pendanaan KUR Syariah yang diterima perusahaan mereka sudah mencukupi. Fakta bahwa 22 orang (atau 22,9% dari total) sangat setuju dan 51 orang (atau 53,1% dari total) setuju membuktikan hal ini. Lima orang (5,2%) tidak setuju dan sangat tidak setuju, sementara

delapan belas orang (18,8%) menganggapnya adil. Berdasarkan tanggapan tersebut, tampaknya pembiayaan Syariah KUR Bank Syariah Indonesia cocok untuk perusahaan.

Tabel 4.9
Prosedur pengajuan KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia
mudah dipahami

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Sangat Tidak setuju	1	1%
2.	Tidak Setuju	5	5,2%
3.	Netral	15	15,6%
4.	Setuju	47	49%
5.	Sangat Setuju	28	29,2%
Total		96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar orang setuju dengan penjelasan yang diberikan. Hasil menunjukkan hal ini, karena 47 orang (atau 49%) mengatakan mereka "setuju," dan 28 orang (atau 29,2%) mengatakan mereka "sangat setuju." Pada saat yang sama, ada 15 orang yang menjawab "Netral," sementara 6 orang (6,2%) tidak setuju atau sangat tidak setuju. Jadi, dapat dikatakan bahwa mayoritas responden mendukung penjelasan yang disarankan.

Tabel 4.10
Persyaratan pengajuan KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia tidak memberatkan

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Sangat Tidak setuju	1	1%
2.	Tidak Setuju	4	4,2%
3.	Netral	23	24%
4.	Setuju	46	47,9%
5.	Sangat Setuju	22	22,9%
Total		96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar orang setuju terhadap pernyataan yang diajukan. Sebagai bukti, perhatikan hal berikut: 46 orang (47,9%) mengatakan mereka "setuju," dan 22 orang (22,9%) mengatakan mereka "sangat setuju." Selain itu, 24 orang mengatakan "cukup," sementara 5 orang tidak setuju atau sangat tidak setuju, sehingga totalnya 5 orang. Dengan demikian, mayoritas responden menganggap penjelasan tersebut memuaskan.

Tabel 4.11
Margin atau ujah KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia tergolong ringan

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Sangat Tidak setuju	1	1%
2.	Tidak Setuju	4	4,2%

3.	Netral	21	21,9%
4.	Setuju	46	47,9%
5.	Sangat Setuju	24	25%
Total		96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Sebagian besar responden merasa bahwa margin atau ujah pembiayaan KUR Syariah Bank Syariah Indonesia tergolong rendah, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Hasil menunjukkan bahwa 46 orang (47,9%) setuju dan 24 orang (25%) sangat setuju dengan pernyataan ini. Sementara itu, 21 orang (atau 21,9% dari total) berpendapat bahwa hal itu wajar, sedangkan 5 orang (atau 5,2% dari total) tidak setuju atau sangat tidak setuju. Dengan demikian, mayoritas responden berpendapat bahwa margin atau ujah pembiayaan KUR Syariah tergolong ringan.

Tabel 4.12
Pencairan dana KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia
dilakukan tepat waktu

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Sangat Tidak setuju	0	0%
2.	Tidak Setuju	1	1%
3.	Netral	22	22,9%
4.	Setuju	44	45,8%
5.	Sangat Setuju	29	30,2%
Total		96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Menurut data di atas, sebagian besar orang berpendapat bahwa Bank Syariah Indonesia melakukan pekerjaan yang baik dalam menyalurkan pembiayaan KUR Syariah dalam jangka waktu yang disepakati. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa 29 orang (30,2% dari total) mengatakan mereka "sangat setuju," dan 44 orang (45,8% dari total) mengatakan mereka "setuju." Sementara itu, 22 orang (atau 22,9% dari total) berpendapat bahwa proses tersebut adil, sedangkan 1 orang (atau 1% dari total) menyatakan ketidaksetujuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa proses pencairan KUR Syariah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

Tabel 4.13
Jangka waktu pembiayaan KUR Syariah sesuai dengan kemampuan usaha

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Sangat Tidak setuju	1	1%
2.	Tidak Setuju	2	2,1%
3.	Netral	20	20,8%
4.	Setuju	43	44,8%
5.	Sangat Setuju	30	31,3%
Total		96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Tabel di atas, dapat di lihat bahwa sebagian besar orang berpendapat bahwa periode pembiayaan KUR Syariah sangat tepat untuk tujuan yang ingin mereka capai. Dari total responden, 43 orang (44,8%) menyatakan "setuju," dengan 30 orang (31,3%) menyatakan "sangat setuju." Terdapat 20

tanggapan afirmatif (20,8%), dan 3 (3,1%) tanggapan "tidak setuju" atau "sangat tidak setuju". Dengan demikian, mayoritas responden merasa bahwa waktu yang mereka habiskan untuk bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia terbayar lunas oleh periode pembiayaan KUR Syariah. Dengan demikian mayoritas responden jangka waktu telas sesuai dengan kemampuan usaha mereka.

Tabel 4.14
Sistem angsuran KUR Syariah memudahkan saya dalam
membayar cicilan

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Sangat Tidak setuju	1	1%
2.	Tidak Setuju	3	3,1%
3.	Netral	19	19,8%
4.	Setuju	45	46,9%
5.	Sangat Setuju	28	29,2%
Total		96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Mayoritas responden merasa bahwa sistem pembiayaan KUR Syariah menyederhanakan pembayaran pinjaman, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Sebagai bukti, perhatikan hal berikut: 45 orang (46,9% dari total) mengatakan mereka "setuju," dan 28 orang (29,2% dari total) mengatakan mereka "sangat setuju." Namun, empat orang (4,1%) menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju, sementara sembilan belas orang (19,8%) menganggapnya adil atau netral. Berdasarkan tanggapan tersebut, tampaknya

mayoritas nasabah Bank Syariah Indonesia berpendapat bahwa sistem angsuran KUR Syariah merupakan cara yang baik untuk membayar kembali pembiayaan mereka.

b. Variabel Y (Variabel Dependen)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah inklusi keuangan UMKM. Variabel ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaku UMKM memiliki akses terhadap layanan keuangan formal seperti tabungan, pembiayaan, serta berbagai layanan perbankan lainnya.

Tabel 4.15
Saya lebih mudah mengakses layanan keuangan formal setelah menerima pembiayaan KUR Syariah

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Sangat Tidak setuju	0	0%
2.	Tidak Setuju	1	1%
3.	Netral	34	35,4%
4.	Setuju	44	45,8%
5.	Sangat Setuju	17	17,7%
Total		96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Mayoritas responden setuju dan mengatakan mereka menggunakan produk perbankan lebih mudah mengakses layanan keuangan setelah menerima pembiayaan KUR Syariah, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa 17 orang (17,7%) sangat setuju dan 44 orang (45,8%) setuju. Ada 34 orang yang berpikir itu adil (35,4%) dan

1 orang yang tidak setuju (1%) sangat tidak setuju (0). Hal ini menunjukkan bahwa bisnis yang merespons lebih cenderung menggunakan layanan perbankan digital (keuangan formal) ketika mereka memiliki akses ke pembiayaan Syariah KUR melalui Bank Syariah Indonesia.

Tabel 4.16
Saya lebih aktif menggunakan produk perbankan
setelah menerima pembiayaan KUR Syariah

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Sangat Tidak setuju	1	1%
2.	Tidak Setuju	3	3,1%
3.	Netral	30	31,3%
4.	Setuju	44	45,8%
5.	Sangat Setuju	18	18,8%
Total		96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Mayoritas responden setuju dan mengatakan mereka menggunakan produk perbankan lebih aktif setelah menerima pembiayaan KUR Syariah, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa 18 orang (18,8%) sangat setuju dan 44 orang (45,8%) setuju. Ada 30 orang yang berpikir itu adil (31,3%) dan 4 orang yang tidak setuju atau sangat tidak setuju (4,1%). Dengan demikian, responden lebih cenderung menggunakan produk perbankan setelah menerima pembiayaan KUR Syariah dari Bank Syariah Indonesia.

Tabel 4.17
 Saya lebih sering menggunakan layanan digital banking dalam kegiatan usaha

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Sangat Tidak setuju	1	1%
2.	Tidak Setuju	3	3,1%
3.	Netral	24	25%
4.	Setuju	42	43,8%
5.	Sangat Setuju	26	27,1%
Total		96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Mayoritas responden merasa lebih nyaman menggunakan lembaga keuangan formal untuk keperluan usaha, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Di sini kita dapat melihat bahwa 42 orang (atau 43,8% dari total) mengatakan "setuju" dan 26 orang (atau 27,1% dari total) mengatakan "sangat setuju." Sementara itu, 24 atau 25% responden mengatakan "netral," sedangkan 4,1% mengatakan "tidak setuju" atau "sangat tidak setuju." Hal ini membuat kita percaya bahwa pembiayaan Syariah KUR Bank Syariah Indonesia.

Tabel 4.18
 Saya lebih percaya menggunakan lembaga keuangan formal untuk kebutuhan usaha

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Sangat Tidak setuju	1	1%
2.	Tidak Setuju	2	2,1%

3.	Netral	26	27,1%
4.	Setuju	40	41,7%
5.	Sangat Setuju	27	28,1%
Total		96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa mereka lebih percaya menggunakan lembaga keuangan formal untuk kebutuhan usaha. Hal ini ditunjukkan oleh 40 responden (41,7%) yang menjawab setuju dan 27 responden (28,1%) yang menjawab sangat setuju. Sementara itu, 26 responden (27,1%) menyatakan netral, sedangkan 3 responden (3,1%) menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR Syariah dari Bank Syariah Indonesia meningkatkan kepercayaan responden terhadap penggunaan lembaga keuangan formal dalam memenuhi kebutuhan usaha.

Tabel 4.19
Interaksi saya dengan lembaga keuangan formal meningkat setelah menerima pembiayaan KUR Syariah

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Sangat Tidak setuju	1	1%
2.	Tidak Setuju	5	5,2%
3.	Netral	22	22,9%
4.	Setuju	40	41,7%
5.	Sangat Setuju	28	29,2%

Total	96	100%
-------	----	------

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Mayoritas responden merasa lebih nyaman menggunakan lembaga keuangan formal untuk keperluan perusahaan, seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas. Di sini kita dapat melihat bahwa 40 orang (atau 41,7% dari total) mengatakan "setuju" dan 28 orang (atau 29,2% dari total) mengatakan "sangat setuju." Sementara itu, 22,9% responden mengatakan "netral," sedangkan 6,2% mengatakan "tidak setuju" atau "sangat tidak setuju." Hal ini membuat kita percaya bahwa pembiayaan Syariah KUR Bank Syariah Indonesia meningkatkan kepercayaan responden terhadap penggunaan lembaga keuangan formal dalam memenuhi kebutuhan usaha.

6. Analisis Data

a. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1) Hasil Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menilai seberapa efektif suatu instrumen penelitian dalam mengukur hal yang seharusnya diukur. Menurut Sugiyono (2017, Hlm. 121), menyatakan bahwa uji validitas berfungsi untuk menentukan apakah suatu kuesioner dapat dianggap sah atau tidak. Suatu instrumen dianggap valid jika nilai korelasi (r hitung) melebihi r tabel.

Tabel 4.20
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
(X) Pembiayaan KUR Syariah BSI	1	0,771	0,3610	Valid
	2	0,816	0,3610	Valid
	3	0,517	0,3610	Valid
	4	0,752	0,3610	Valid
	5	0,685	0,3610	Valid
	6	0,850	0,3610	Valid
	7	0,669	0,3610	Valid
(Y) Inklusi Keuangan UMKM	1	0,623	0,3610	Valid
	2	0,728	0,3610	Valid
	3	0,677	0,3610	Valid
	4	0,600	0,3610	Valid
	5	0,803	0,3610	Valid

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji validitas terhadap seluruh item pernyataan pada variabel Pembiayaan KUR Syariah (X) dan variabel Inklusi Keuangan UMKM (Y) menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,3610. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Pada variabel Pembiayaan KUR Syariah BSI (X) terdapat 7 item pernyataan yang diuji validitasnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa

nilai r hitung berkisar antara 0,517 hingga 0,850, dimana seluruh nilai tersebut lebih besar dari r tabel (0,3610). Oleh karena itu, seluruh item pernyataan pada variabel pembiayaan KUR Syariah dinyatakan valid dan mampu mengukur variabel yang diteliti dengan baik.

Selanjutnya, pada variabel Inklusi Keuangan UMKM (Y) terdapat 5 item pernyataan yang diuji validitasnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai r hitung berkisar antara 0,600 hingga 0,803, yang juga lebih besar dari r tabel (0,3610). Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel inklusi keuangan juga dinyatakan valid.

2) Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah proses pengujian yang dilakukan untuk mengetahui konsistensi suatu instrumen penelitian dalam mengukur variabel. Menurut Ghozali (2018, Hlm. 45), menyebutkan bahwa sebuah variabel dianggap memiliki reliabilitas jika nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$. Pendapat ini sejalan dengan Sugiyono (2017, Hlm. 130), yang menjelaskan bahwa alat ukur yang terpercaya akan memberikan data yang stabil ketika digunakan berkali-kali pada objek yang serupa.

Tabel 4.21
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reabilitas	N of Items	keterangan
KUR (X)	0,907	0,60	7	Reliabel
UMKM (Y)	0,859	0,60	5	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel Pembiayaan KUR Syariah (X) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,907 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 7 item. Nilai tersebut lebih besar dari standar reliabilitas yaitu 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel pembiayaan KUR Syariah dinyatakan reliabel.

Selanjutnya, pada variabel Inklusi Keuangan UMKM (Y) diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,859 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 5 item. Nilai tersebut juga lebih besar dari standar reliabilitas yaitu 0,60, sehingga seluruh item pernyataan pada variabel inklusi keuangan juga dinyatakan reliabel.

b. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Menurut Ghazali (2018, Hlm. 19), statistik deskriptif berfungsi untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Tabel 4.22
Analisis Deskriptif

	N	minimum	maximum	mean	Std. Deviation
KUR (X)	96	14	35	27.29	4.834

UMKM (Y)	96	11	25	19.38	3.525
-------------	----	----	----	-------	-------

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 96 responden. Pada variabel Pembiayaan KUR Syariah (X) diperoleh nilai minimum 14, maksimum 35, dengan nilai rata-rata (mean) 27,29 dan standar deviasi 4,834.

Sedangkan pada variabel Inklusi Keuangan UMKM (Y) diperoleh nilai minimum 11, maksimum 25, dengan nilai rata-rata (mean) 19,38 dan standar deviasi 3,525.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang cukup baik terhadap pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia serta tingkat inklusi keuangan UMKM.

c. Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah terhadap inklusi keuangan UMKM. Menurut Ghozali (2018, Hlm. 95), analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Tabel 4.23
Regresi Linier Sederhana Variables Entered/Removed^a

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Total X ^b	.	Enter
a. Dependent Variable: Variabel (Y) inklusi keuangan UMKM b. All requested variables entered			

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel yang dimasukkan dalam model regresi adalah Total X sebagai variabel independen yaitu pembiayaan KUR Syariah, sedangkan Total Y sebagai variabel dependen yaitu inklusi keuangan UMKM. Metode yang digunakan dalam analisis regresi ini adalah metode Enter, dimana seluruh variabel independen dimasukkan secara langsung ke dalam model analisis menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistics.

Tabel 4.24
Regresi Linier Sederhana Model Summary

Model Summary				
Model	R	R square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,832 ^a	0,692	0,689	1.967

a. Predictors: (Constant), Variabel (X) Pembiayaan KUR Syariah

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan tabel diatas bahwa R sebesar 0,832, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pembiayaan KUR Syariah (X) dengan inklusi keuangan UMKM (Y) termasuk dalam kategori kuat.

Nilai *R Square* sebesar 0,692 menunjukkan bahwa 69,2% variasi inklusi keuangan UMKM dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan KUR Syariah, sedangkan sisanya sebesar 30,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Sementara itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,689 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah sampel dan variabel penelitian, pengaruh pembiayaan KUR Syariah terhadap inklusi keuangan UMKM tetap berada pada tingkat yang kuat. Analisis ini dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS Statistics.

Tabel 4.25
Regresi Linier Sederhana ANOVA^a

ANOVA ^a						
Model		Sum of squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	regression	816.756	1	816.756	211.069	0,000 ^b
	Residual	363.744	94	3.870		
	Total	1180.500	95			

- c. Dependent Variable: Variabel (Y) inklusi keuangan UMKM
- d. Predictors: (Constant), Variabel (X) Pembiayaan KUR Syariah

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan tabel (ANOVA) dapat diketahui bahwa nilai

Hipotesis penelitian:

H_0 : Variabel (X) Pembiayaan KUR Syariah tidak berpengaruh terhadap variabel (Y) inklusi keuangan UMKM.

H_1 : Variabel (X) Pembiayaan KUR Syariah berpengaruh terhadap variabel (Y) inklusi keuangan UMKM.

Pedoman pengambilan keputusan:

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan.
2. Jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM. Pengujian ini dilakukan menggunakan program IBM SPSS Statistics.

Tabel 4.26
Regresi Linier Sederhana Coefficients^a

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.517	1.178		2.138	0,035
	Total X	0,607	0,042	0,832	14.528	0,000

1. Dependent Variable: Variabel (Y) inklusi keuangan UMKM

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan tabel di atas pada Coefficients^a diperoleh nilai konstanta sebesar 2,517 dan koefisien regresi (b) variabel pembiayaan KUR Syariah (X) sebesar 0,607. Dengan demikian, persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 2,517 + 0,607X$$

$$\text{inklusi keuangan UMKM} = 2,517 + 0,607 \text{ Pembiayaan KUR}$$

Syariah.

Nilai konstanta sebesar 2,517 menunjukkan bahwa apabila pembiayaan KUR Syariah bernilai 0, maka tingkat inklusi keuangan UMKM (Y) sebesar 2,517.

Sementara itu, nilai koefisien regresi 0,607 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembiayaan KUR Syariah sebesar 1 satuan akan meningkatkan inklusi keuangan UMKM sebesar 0,607. Hal ini menunjukkan bahwa

pembiayaan KUR Syariah berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan UMKM.

Berdasarkan nilai t hitung sebesar 14,528 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR Syariah berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis (H_1) diterima, yaitu pembiayaan KUR Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM, sedangkan hipotesis nol (H_0) ditolak. Analisis ini dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS Statistics.

b. Uji Asumsi Klasik

1). Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2018 Hlm. 161), uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai residual berdistribusi normal.

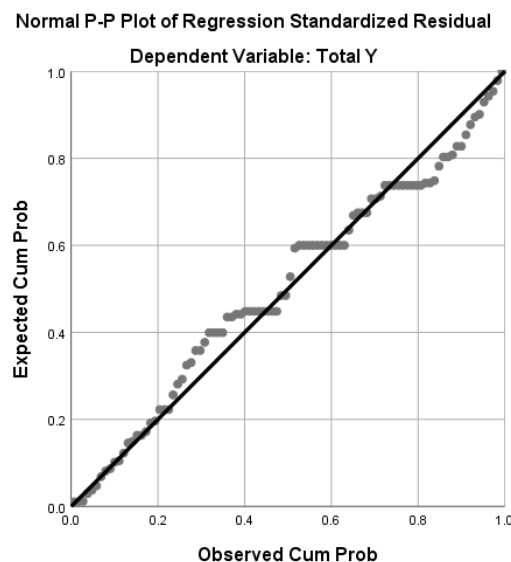
Tabel 4.27
Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov ^a			
	Statistic	df	Sig.
X	0,142	96	0,000
Y	0,102	96	0,16
a. Lilliefors Significance Correction			

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel Pembiayaan KUR Syariah (X) sebesar 0,000, sedangkan pada variabel Inklusi Keuangan UMKM (Y) sebesar 0,16. Nilai signifikansi variabel X lebih kecil dari 0,05, sehingga data pada variabel tersebut tidak berdistribusi normal. Sementara itu, nilai signifikansi variabel Y lebih besar dari 0,05, sehingga berdistribusi normal.

Gambar 4.1
Grafik Normal P-P Plot Uji Normalitas dengan SPSS



Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan grafik Normal P-P Plot, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, sehingga menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal dan asumsi normalitas telah terpenuhi. Meskipun hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa variabel X tidak berdistribusi normal ($\text{Sig} < 0,05$), namun secara visual melalui grafik

Normal P-P Plot, data residual tetap mengikuti garis diagonal, sehingga model regresi masih dapat digunakan..

2) Uji linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat linear atau tidak. Menurut Ghazali (2018, Hlm. 159), Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat linear atau tidak.

Tabel 4.28
Uji linearitas

Keterangan	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Deviation from Linearity	96.094	16	6.006	1.750	0.054

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi pada *Deviation from Linearity* sebesar 0,054. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari linearitas.

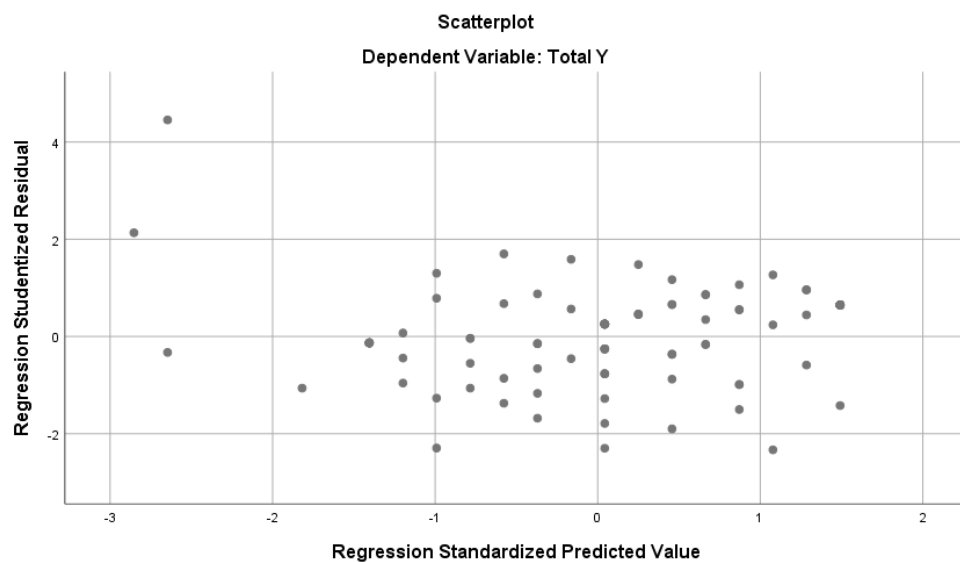
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hubungan antara pembiayaan KUR Syariah dengan inklusi keuangan UMKM bersifat

linear, sehingga model regresi linier sederhana dapat digunakan dalam penelitian ini.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Menurut Ghazali (2018, Hlm. 137), model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas (scatterplot)



Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan gambar 4.2 diatas grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar tidak membentuk garis atau pola yang teratur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala *heteroskedastisitas* pada model regresi.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah terhadap inklusi keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistics melalui beberapa tahapan pengujian statistik.

Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,607 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembiayaan KUR Syariah akan meningkatkan tingkat inklusi keuangan UMKM. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR Syariah berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM.

Nilai R Square sebesar 0,692 menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah mampu menjelaskan pengaruh terhadap inklusi keuangan UMKM sebesar 69,2%, sedangkan sisanya sebesar 30,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan formal.

Pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha dengan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pembiayaan tersebut, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan perbankan seperti

pembukaan rekening, penggunaan layanan digital banking, serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal.

Selain itu, kemudahan prosedur pengajuan, persyaratan yang tidak memberatkan, serta sistem angsuran yang relatif ringan juga menjadi faktor yang mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan layanan keuangan formal. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan tingkat inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep inklusi keuangan yang menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal secara mudah, terjangkau, dan berkelanjutan. Dengan adanya program pembiayaan KUR Syariah, pelaku UMKM yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses lembaga keuangan menjadi lebih mudah memperoleh layanan keuangan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya (Tambunan, 2012, Hlm. 18).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR Syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM, khususnya dalam memberikan akses permodalan dan meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dalam sistem keuangan formal.